



ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA EKONOMI KABUPATEN BUTON UTARA DENGAN KABUPATEN INDUKNYA

Wa Ode Rachmasari Ariani*¹, Fitri Lapau²

^{1,2} Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Corresponding Author: arianirachma@uho.ac.id

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 Maret 2025</p> <p>Revised : 06 April 2025</p> <p>Accepted : 02 Mei 2025</p> <p>Publication : 30 Mei 2025</p>	<p>Abstract: <i>Buton Utara Regency has been a new autonomous region since 2007 as a result of the division of Muna Regency. The local government has implemented various development programs to improve its economic performance after the division. The objective of this study is to assess the economic performance of Buton Utara Regency as a new autonomous region. The data analysis method used is quantitative descriptive with an observation period from 2010 to 2023. The research findings indicate that the economic performance of Buton Utara Regency is better than that of Muna Regency in several indicators, namely economic growth, per capita GDP, and human development index (HDI) growth. However, regarding HDI values, the poverty depth index and poverty severity index show that Buton Utara Regency's performance is lower than that of Muna Regency. Key findings indicate that fluctuations in economic growth and HDI performance categorized as moderate reflect challenges in economic stability. Policy implications emphasize the need for strengthening priority sectors and effective poverty alleviation programs based on data. The limitations of the study lie in the less in-depth analytical approach, which has not yet captured the complexity of the interplay between variables.</i></p>
<p>Keywords: <i>Economic Growth, Gross Regional Domestic Product per Capita, HDI, Poverty, New Autonomous Region.</i></p> <p>Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, IPM, Kemiskinan, Otonomi Baru.</p>	<p>Abstrak: Kabupaten Buton Utara telah menjadi daerah otonomi baru sejak tahun 2007 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Muna. Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kinerja perekonomiannya pasca-pemekaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja ekonomi Kabupaten Buton Utara sebagai daerah otonomi baru. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan periode observasi 2010–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Kabupaten Buton Utara lebih baik dari pada Kabupaten Muna pada beberapa indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan perkembangan IPM. Sedangkan terkait nilai IPM, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kinerja Kabupaten Buton Utara lebih rendah dibandingkan Kabupaten Muna. Temuan kunci mengindikasikan bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan kinerja IPM dengan kategori sedang mencerminkan tantangan dalam stabilitas perekonomian. Implikasi kebijakan menekankan perlu penguatan sektor unggulan dan program pengentasan kemiskinan yang efektif berbasis data. Keterbatasan studi terletak pada pendekatan alat analisis yang kurang mendalam sehingga belum dapat menangkap kompleksitas pengaruh antar variabel</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

INTRODUCTION

Pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru di era reformasi, dan merupakan salah satu fenomena dalam menjawab keinginan diberbagai daerah untuk dapat membentuk daerah otonomi baru. Dengan terbentuknya daerah otonomi baru diharapkan dapat mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diamanahkan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 pasal 3 menyatakan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pembentukan daerah harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut: a) kemampuan ekonomi; b) potensi daerah; c) sosial budaya; d) sosial politik; e) jumlah penduduk; f) luas daerah; g) serta pertimbangan lain. Pasal 4 menyatakan bahwa kemampuan ekonomi mencerminkan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung disuatu daerah yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penerimaan daerah. Kedua komponen tersebut menjadi ukuran keberhasilan dan kemandirian didalam pembangunan ekonomi daerah.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah otonomi baru menjadi prioritas yang seharusnya dapat terwujud. Lincoln Arsyad (2010) menyatakan bahwa untuk melihat laju pembangunan suatu negara/wilayah dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maka penambahan pendapatan nasional/daerah dan pendapatan perkapita dari waktu ke waktu menjadi titik tolaknya. Keberhasilan dan suksesnya pemerintahan daerah otonomi baru didalam menyelenggarakan pemerintahannya dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari aspek ekonomi dengan beberapa indikator-indikatornya yaitu, tingkat pertumbuhan ekonomi perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, inflasi dan lain-lain yang kesemua indikator tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Kebijakan tentang pemekaran daerah otonomi baru telah berjalan kurang lebih dua dekade. Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2011) menyimpulkan

bahwa harapan dan tujuan dari pembentukan daerah otonom masih jauh dari yang diharapkan serta masih memerlukan usaha keras untuk mewujudkannya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sehingga pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk melakukan moratorium pengajuan daerah otonomi baru. Kebijakan moratorium ini tentu sebagai imbas dari kurang berhasilnya pelaksanaan pemerintahan di beberapa wilayah yang sudah terjadi pemekaran. Kabupaten Buton Utara merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang telah melaksanakan pemekaran wilayah. UU Nomor 14 tahun 2007 merupakan dasar hukum yang sah dari lahirnya Kabupaten Buton Utara yang resmi memekarkan diri dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Muna sejak tanggal 2 Januari tahun 2007. Mekarnya Kabupaten Buton Utara hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, dan sudah terjadi pergantian beberapa kepala daerah yang memimpin. Tentunya, dengan berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan, perlu dilakukan suatu studi untuk mengukur kinerja yang telah dilaksanakan oleh daerah tersebut, apakah mampu membawa daerahnya menjadi lebih baik dalam sektor ekonomi, sebagaimana yang menjadi tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Selain itu penelitian ini sebagai upaya untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang perbandingan kinerja ekonomi daerah otonomi baru dan daerah induknya. Dari uraian latar belakang tersebut maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja ekonomi Kabupaten Buton Utara.

METHOD

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan wawancara dengan instansi terkait. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah terdapat 4 (empat) faktor yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, tata pemerintahan yang baik, ketersediaan pelayanan public, dan peningkatan daya saing daerah. Untuk melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah maka penelitian ini focus pada faktor kesejahteraan masyarakat yang diukur oleh :

1. Laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- R = Laju pertumbuhan ekonomi dengan satuan persen
- PDRB_t = Produk domestik regional bruto pada tahun tertentu
- PDRB_{t-1} = Produk domestik regional bruto pada tahun sebelumnya

2. Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Laju PPK} = \frac{\text{PPK}_t - \text{PPK}_{t-1}}{\text{PPK}_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

- Laju PPK = Laju Pendapatan perkapita (persen)
- PPK_t = Pendapatan Perkapita Tahun Tertentu (Rp)
- PPK_{t-1} = Pendapatan Perkapita pada tahun sebelumnya (Rp)

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dianalisis secara deskriptif yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Capaian IPM dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM kedalam beberapa kategori yaitu:

- a. IPM < 60 : IPM rendah;
- b. 60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang
- c. 70 ≤ IPM < 80 : IPM tinggi dan
- d. IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi

4. Kemiskinan dihitung menggunakan rumus:

$$\%PM_k = \frac{PM_k}{P_k} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

- % PM_k = % Penduduk miskin di kabupaten
- PM_k = Jumlah penduduk miskin di kabupaten
- P_k = Jumlah penduduk di kabupaten

$$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan :

- α = 0,1,2
- z = garis kemiskinan
- y_i = rata-rata pengeluaran perkapita penduduk sebulan yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...q), y_i < z
- q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
- n = jumlah penduduk.

RESULTS AND DISCUSSION

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator untuk melihat terjadinya perkembangan suatu daerah, namun bukan merupakan satu-satunya tolak ukur kemakmuran daerah, perlu juga dilihat dari indikator-indikator lainnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara serta Kabupaten Muna sebagai kabupayen induknya diperoleh melalui data PDRB atas dasar harga konstan 2010 dapat dilihat melalui Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Muna Tahun 2010-2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	
	Kabupaten Buton Utara	Kabupaten Muna
2010	9.14	6.78
2011	9.33	8.12
2012	8.78	7.85
2013	8.83	6.68
2014	9.59	9.33
2015	4.13	7.15
2016	6.04	6.08
2017	6.28	5.02
2018	5.89	5.16
2019	5.69	5.40
2020	0.99	0.07
2021	4.08	3.18
2022	5.01	5.90
2023	2.46	2.06
Rata-rata	6.16	5.63

Sumber : Data Sekunder (diolah)

Berdasarkan Tabel 1, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara selama kurun waktu 2010-2023 berfluktuasi dimana pada tahun tahun 2015 sebesar 4,13 persen yang merupakan laju pertumbuhan terendah dimasa normal dan 0,99 persen pada tahun 2020 yang terjadi akibat adanya wabah covid-19. Pada tahun 2014 sebesar 9,59 persen merupakan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara yaitu sebesar 6,16 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna juga berfluktuasi. Laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,07, hal ini terjadi akibat adanya wabah Covid-19, sedangkan pertumbuhan terendah dimasa normal terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,02 persen. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna sebesar 5,63 persen. Secara rata-rata kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara lebih baik dari pada kabupaten induknya Kabupaten Muna.

Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi bila dilihat dari data PDRB akibat berfluktuasinya peningkatan besaran setiap tahun pada sektor-sektor strategis seperti sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran maupun sektor administrasi pemerintahan. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara pada tahun 2015 dikarenakan oleh peningkatan yang kurang maksimal pada beberapa sektor ekonomi. Sedangkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada tahun 2014, ditunjang oleh peningkatan yang sangat tinggi pada sektor pertambangan yang berkontribusi terhadap PDRB sebesar 40,27 persen, kemudian disusul oleh sektor pertanian sebesar 18,49 persen, dan sektor perdagangan eceran sebesar 12,99 persen. Sektor pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami trend yang menurun kontribusinya terhadap total PDRB.

Berfluktuasinya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Muna dapat dipengaruhi oleh masih kurang optimalnya output yang dihasilkan di kedua wilayah tersebut. Faktor utama diakibatkan oleh kualitas sumberdaya manusia yang masih cukup rendah dan kemampuan penggunaan teknologi pada semua sektor ekonomi, sehingga produktivitas menjadi rendah yang pada akhirnya berdampak pada kurang optimal dalam memacu peningkatan laju perekonomian daerah. Hal tersebut sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Romer (1994) dalam Lincolin Arsyad (2010) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan merupakan modal dan penentu cepat atau lambatnya laju perekonomian. Akumulasi modal menjadi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal yang dimaksud ini, yaitu modal dalam arti luas seperti modal ilmu pengetahuan dan modal insani (*human capital*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dibutuhkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (penduduk) melalui investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta penerapan teknologi didalam menunjang pembangunan daerah disegala bidang.

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita diperoleh melalui pendapatan regional yang dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, sehingga hasil perhitungan pendapatan perkapita dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat kesejahteraan dan pembangunan disuatu daerah.

Pendapatan perkapita dapat diketahui melalui perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita yang mengindikasikan ukuran kemampuan suatu daerah memenuhi kebutuhan hidup setiap penduduknya. Data PDRB Perkapita ini dapat dijadikan indikator keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku meupakan gambaran nilai PDRB perkepala atau persatu orang penduduk, sedangkan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan dapat menjadi gambaran pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Buton Utara 2010-2023

Tahun	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	
	Kabupaten Buton Utara	Kabupaten Muna
2010	15.49	14.05
2011	17.17	15.59
2012	27.02	17.19
2013	29.94	18.68
2014	33.60	28.51
2015	36.22	31.47
2016	39.37	33.96
2017	42.59	36.31
2018	45.64	38.90
2019	57.54	41.47
2020	49.41	41.23
2021	50.52	33.52
2022	55.83	37.32
2023	58.72	39.23
Rata-rata	39.93	30.53

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Pendapatan Perkapita Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Muna dapat dilihat pada Tabel 2. Perkembangan perekonomian Kabupaten Buton Utara sejak tahun 2010-2023 dilihat dari nilai nominal PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB perkapita pada tahun 2010 sebesar 15,49 juta rupiah/tahun, mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 58,72 juta rupiah/tahun. Rata-rata PDRB Perkapita Kabupaten Buton Utara selama kurun waktu 2010-2023 sebesar 39,93 juta rupaiah. PDRB perkapita Kabupaten Muna terlihat lebih rendah dari pada Kabupaten Buton Utara. Tahun 2010 PDRB perkapita Kabupaten Muna sebesar 14.04 juta rupiah/tahun. Pada tahun 2023 besaran PDRB perkapita menjadi 39.23 juta rupiah/tahun lebih rendah dari Kabupaten Butorn Utara ditahun yang sama. Rata-rata PDRB per Kapita Kabupaten Muna selama 14 tahun terakhir adalah sebesar Rp. 30.53 juta/tahun.

Peningkatan PDRB Perkapita secara nominal yang telah dicapai oleh Kabupaten Buton Utara lebih baik dari kabupaten induknya. Peningkatan PDRB perkapita

menunjukkan peningkatan standar hidup layak minimal masyarakat sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat yang tentunya dapat berkontribusi didalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Data pendapatan perkapita dapat bermanfaat didalam menentukan keterjangkauan suatu daerah, serta sebagai dasar investor didalam menginvestasikan modalnya didaerah tersebut. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur tunggal peningkatan kesejahteraan masyarakat, masih terdapat tolak ukur lainnya yang harus meningkat secara bersama-sama. Pertumbuhan PDRB perkapita terlihat berfluktuasi, tentu hal ini menjadi sebuah gambaran masih kurang optimalnya kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan didalam meningkatkan pendapatan daerah agar perekonomian meningkat akan menjadi sia-sia apabila tidak diimbangi dengan upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam upaya pembangunan ekonomi. Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Jhingan (2004) bahwa pertumbuhan penduduk cenderung memperlambat pendapatan perkapita melalui tiga cara yaitu memperberat beban penduduk, menaikkan biaya barang konsumsi dan dapat memerosotkan akumulasi modal.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi salah satu instrumen yang berlaku untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. IPM merupakan indikator pengukuran keberhasilan didalam pembangunan kualitas hidup masyarakat, sebagai ukuran keberhasilan kinerja pemerintah serta salah satu indikator didalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM memberikan penjelasan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dapat memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM terdiri dari tiga komponen utama yaitu 1) Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur kesehatan dan harapan hidup penduduk; 2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur tingkat pendidikan dan kemampuan dari baca tulis penduduk; 3) Pengeluaran per Kapita untuk mengukur tingkat pendapatan dan kemampuan ekonomi dari penduduk. Kriteria IPM terbagi menjadi empat kategori yaitu: Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi. Perkembangan IPM kedua kabupaten sejak Tahun 2010-2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel. 3. Data Perkembangan IPM Tahun 2010-2023

Tahun	Kabupaten Buton Utara		Kabupaten Muna	
	IPM	Perkembangan (persen)	IPM	Perkembangan (persen)
2010	60.94	0.00	62.57	0.00
2011	61.58	1.05	63.08	0.82
2012	62.69	1.80	63.76	1.08
2013	64.20	2.41	64.67	1.43
2014	64.65	0.70	65.09	0.65
2015	65.23	0.90	65.99	1.38
2016	65.95	1.10	66.96	1.47
2017	66.40	0.68	67.61	0.97
2018	67.13	1.10	68.47	1.27
2019	67.68	0.82	68.97	0.73
2020	67.87	0.28	69.02	0.07
2021	68.08	0.31	69.17	0.22
2022	69,00	1.35	69,61	0.64
2023	69.85	1.23	70,16	0.79
Rerata	65.56	0.97	66,79	0.82

Sumber : Data Sekunder (Diolah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buton Utara menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. IPM pada tahun 2010 sebesar 60,94 dan pada tahun 2023 sebesar 69,85. Perkembangan IPM pada tahun 2011 sebesar 1,05 persen dan pada tahun 2023 perkembangannya sebesar 1,23 persen. Peningkatan IPM Kabupaten Buton Utara kecenderungannya berfluktuasi. Berdasarkan data IPM tersebut kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Buton Utara berada pada level atau kriteria sedang atau menengah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muna menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Buton Utara. Dimana pada tahun 2010 sebesar 62,57 dan pada tahun 2021 sebesar 69,17. Namun pertumbuhan atau peningkatan IPM di Kabupaten Muna terlihat lebih kecil bila dibandingkan dengan Kabupaten Buton Utara serta kecenderungannya juga berfluktuasi. IPM Kabupaten Muna juga masuk dalam kriteria sedang atau menengah

Sebagai daerah otonomi baru kinerja perkembangan IPM Kabupaten Buton Utara berada pada trend yang cukup baik, implikasinya masih memerlukan upaya menyeluruh agar jumlah penduduk yang tidak bersekolah dapat diminimalisir, kesadaran masyarakat akan pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, serta pengembangan ekonomi lokal dapat berdampak kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh setiap daerah bahkan setiap Negara. Berbagai upaya telah banyak dilakukan, namun kemiskinan selalu saja ada. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar ketimpangan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Data kemiskinan Kabupaten Buton Utara sejak resmi menjadi daerah otonomi baru dapat dilihat pada Tabel 4. Data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton Utara selama periode tahun 2010 hingga 2023 secara umum menurun. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2013, 2016 dan tahun 2017. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 10,32 ribu jiwa sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 9,09 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin secara umum terjadi penurunan, hanya pada tahun 2013 terjadi peningkatan. Rata-rata persentase penduduk miskin sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2023 sebesar 14,16 persen.

Tabel 4. Data Kemiskinan Kabupaten Buton Utara Tahun 2007-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparaharan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp)
		P0	P1	P2	
2010	10,32	18.78	2.65	0.58	223.104
2011	9.80	17.34	2.65	0.63	239.365
2012	9.00	15.76	2.36	0.54	256.811
2013	10.80	17.53	3.58	1.34	242.884
2014	9.70	16.35	2.44	0.64	243.172
2015	9.50	15.86	3.01	0.88	258.425
2016	9.60	15.78	4.04	1.53	275.544
2017	9.63	15.58	2.55	0.65	280.974
2018	9.38	14.93	1.95	0.37	306.437
2019	9.18	14.38	1.63	0.36	331.555
2020	9.13	14.10	2.34	0.61	345.039
2021	9.45	14.89	2.46	0.61	355.288
2022	9.13	14.26	2.66	0.72	373.792
2023	9.09	14.06	2.13	0.48	403.834
Rata-rata	9,94	14.16	2.40	0,81	294.308

Sumber : Data Sekunder (diolah)

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa secara umum kemiskinan di Kabupaten Buton Utara mengalami trend menurun sejak tahun 2010 hingga tahun 2023. Berdasarkan

indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan indeks yang berfluktuasi walaupun ada kecenderungan menurun. Seperti pada indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 2,65, pada tahun 2012 menurun menjadi 2,36. Pada tahun 2023 indeks kedalaman menjadi 2,13. Rata-rata indeks kedalaman kemiskinan yaitu 2,40. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin besar kesenjangan antara pendapatan penduduk miskin dan garis kemiskinan pada periode tersebut. Begitupula pada indeks keparahan kemiskinan berfluktuasi walaupun ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2010 sebesar 0,58, pada tahun 2015 meningkat tajam menjadi sebesar 0,88 dan tahun 2023 menurun menjadi 0,48. Rata-rata indeks keparahan kemiskinan yaitu 0,81. Semakin tinggi nilai indeks keparahan, semakin besar kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin. Data terkait kemiskinan Kabupaten Muna dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Data Kemiskinan di Kabupaten Muna Tahun 2010-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (%)	Indeks Keparahannya Kemiskinan/P2 (%)	Garis Kemiskinan (Rupiah)
2010	46.600	17.35	2.58	0.56	232.284
2011	44.300	16.14	2.35	0.57	242.392
2012	40.700	14.64	2.49	0.63	247.928
2013	43.300	15.32	2.82	0.74	253.043
2014	41.300	14.46	2.21	0.57	253.795
2015	44.400	15.45	2.69	0.76	269.838
2016	32.650	15.22	3.19	0.95	290.695
2017	32.350	14.85	2.43	0.61	296.383
2018	29.120	13.19	1.7	0.34	314.928
2019	28.470	12.85	1.71	0.4	342.948
2020	28.730	12.83	1.86	0.46	358.333
2021	30.540	13.54	1.90	0.39	368.922
2022	30.480	13.41	1.57	0.30	387.114
2023	32.240	14.07	2.21	0.50	419.071
Rerata	35.280	14.31	2.24	0.56	305.548

Sumber: Data Sekunder (Diolah)

Data kemiskinan di Kabupaten Muna yang ditunjukkan dari jumlah penduduk miskin terlihat berfluktuasi. Data persentase penduduk miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan angka yang lebih baik dari pada Kabupaten Buton Utara. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebesar 46.600 ribu jiwa, pada tahun 2023 sebesar 32.240 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 17,35 persen, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 14,07 persen dengan kecenderungan juga berfluktuasi. Begitu pula dengan kedalaman serta keparahan kemiskinan terlihat kecenderungannya berfluktuasi. Pada tahun 2016 terlihat kemiskinan paling parah. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan adanya ketidakstabilan perekonomian,

ketergantungan pada faktor eksternal, kurang efektifnya program pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan masuk dalam kategori yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan penduduk miskin didalam memenuhi kebutuhan dasar semakin sulit serta keparahan kemiskinan orang di kabupaten ini juga cukup parah. Fenomena berfluktuasinya besaran angka kedalaman dan keparahan kemiskinan disatu sisi, namun disisi lain jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin cenderung semakin menurun, hal ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah kabupaten untuk segera menyelesaikannya agar penurunan kemiskinan tidak hanya menjadi bukti semu diatas kertas, tetapi benar-benar adalah hal nyata dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengetahui data kedalaman dan keparahan kemiskinan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar menentukan alokasi sumber daya program yang tepat sasaran.

Strategi atau kebijakan pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan menurut Lincoln Arsyad (2010) yaitu pembangunan SDM, pembangunan pertanian dan perdesaan yang disesuaikan dengan potensi lokal dan peranan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemerintah daerah tentu sudah berupaya melahirkan program-program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan, namun masih perlu ditingkatkan. Fokus utama Pemerintah di kedua kabupaten saat ini melalui program prioritas yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yaitu meningkatkan sektor ekonomi berbasis industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan pembangunan infrastruktur. Berbagai program prioritas tersebut sudah cukup baik, namun berbagai program tersebut akan berjalan efektif jika disosialisasikan secara luas dan tepat kepada masyarakat serta perlu adanya keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendorong kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam setiap program pembangunan dan pemberdayaan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mau ikut berperan didalam mensukseskannya. Kebijakan yang telah ditetapkan tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berdampak kepada kesejahteraan secara berkelanjutan. Selain itu perlu adanya upaya untuk mendorong dan menarik investasi masuk di Kabupaten Butorn Utara dan Kabupaten Muna sehingga dapat meningkatkan volume aktivitas perekonomian daerah.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi Kabupaten Buton Utara lebih baik dari kabupaten induknya Kabupaten Muna pada beberapa indikator selama periode tahun 2010-2023 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton Utara rata-rata tumbuh sebesar 6,16 persen sedangkan Kabupaten Muna rata-rata tumbuh sebesar 5,63 persen. PDRB perkapita pada kedua kabupaten berfluktuasi. PDRB perkapita Kabupaten Buton Utara rata-rata sebesar 39,93 juta rupiah per tahun sedangkan Kabupaten Muna sebesar 35.03 juta rupiah pertahun. IPM Kabupaten Buton Utara menunjukkan kinerja kurang baik dibandingkan kabupaten induknya dengan besaran rata-rata sebesar 65,56 termasuk dalam klasifikasi sedang, dengan perkembangan IPM rata-rata sebesar 0,97 persen. IPM Kabupaten Muna rata-rata sebesar 66,79 dengan perkembangan selama periode penelitian sebesar 0,88 persen. Persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Utara sebesar 14,16 persen, sedangkan Kabupaten Muna sebesar 14,31 persen. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Buton Utara lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Muna yaitu sebesar 2,40 dan Kabupaten Muna sebesar 2,24. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Utara sebesar 0,81 lebih tinggi dibandingkan dengan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Muna sebesar 0,56. Implikasi dari temuan penelitian ini adalah membantu meningkatkan pemahaman terkait kinerja ekonomi daerah dan rekomendasi perencanaan dan pengembangan kebijakan yang tepat, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Penelitian ini tentu masih memiliki keterbatasan dalam hal pendekatan alat analisis yang lebih mendalam sehingga belum dapat menangkap kompleksitas pengaruh antar variabel.

REFERENCES

- Agustin, R.(2011) KAMUS LENGKAP BAHASA INDONESIA. Surabaya: Serba Jaya.
- Arsyad, L. (2010). PENGANTAR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. Yogyakarta: BPFE.
- BAPPENAS. (2018). STUDI EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN DAERAH 2001-2017.
- BPS Prov Sultra. (2017). Retrieved November 5, 2017, from Sultra.Bps.Go.Id: <http://sultra.bps.go.id/>
- BPS Buton Utara. (2020). BUTON UTARA DALAM ANGKA 2020. Buranga: BPS.

- Dunn, W. N. (2000). PENGANTAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HAW., W. (2002). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Jhingan, M. (2004). EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kemendagri. (2014). UU NO. 23 TAHUN 2014. Retrieved November 2, 2017, from www.kemendagri.com:www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/10/15/u/u/uu_23_tahun_2014.pdf
- Kementerian Dalam Negeri. (2011). LAPORAN HASIL EVALUASI DAERAH OTONOM HASIL PEMEKARAN (EDOHP). Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. (<http://documents1.worldbank.org/curated/en/400541468049840300/pdf/679920WP0P11070D0EDOHP0Final0Report.pdf>). Diakses tanggal 20 Mei 2021).
- KPU. (2017). UU NO 32 TAHUN 2014. RETRIEVED NOVEMBER 2, 2017, from [KPU.go.id: http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf)
- Mahsun, M. (2006). PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK. Yogyakarta: BPFE.
- Mudrajad, K. (2013). MUDAH MEMAHAMI DAN MENGANALISIS INDIKATOR EKONOMI. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Republik Indonesia. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 129 TAHUN 2000. Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. (<https://ngada.org/pp129-2000.htm>). Diakses 20 Mei 2021)
- Sjafrizal. (2008). EKONOMI REGIONAL: TEORI DAN APLIKASI. Padang: Baduouse Media.
- Sukardi. (2004). METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumaryadi, I. N. (2005). EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH. Depok: Citra Utama.
- Suyanto, B. (2013). ANATOMI KEMISKINAN DAN STRATEGI PENANGNANNYA. Malang: Intrans Publishing.